

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM (Study Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi di Desa Kalirejo Kecamatan Kabat)

Septa Aliva Zahro AF^{1,*}, Andika Ronggo Gumuruh²

Prodi PPKn FKIP Universitas PGRI Banyuwangi

Email : alivasepta@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini fokus pada partisipasi politik masyarakat desa Kalirejo kecamatan Kabat dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020. Partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dikarenakan pada dasarnya ciri dari sebuah Negara Demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Partisipasi ini penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, bagaimana partisipasi politik masyarakat desa Kalirejo dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020. Adapun hasil dari penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat desa Kalirejo dalam pilkada Banyuwangi cukup baik. Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Umum, Demokrasi

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau disingkat dengan Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Secara teoritis, pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Hal ini dikarenakan pemilu melibatkan seluruh masyarakat secara langsung. Melalui pemilu, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya terkait politik maupun sistem kenegaraan.

Hakekatnya, salah satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan

pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu. Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting.

Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Menurut Miriam Budiarjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dengan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan proses pemilihan umum tersebut. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui Partisipasi Politik Masyarakat desa Kalirejo kecamatan Kabat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua bagian yaitu jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang merupakan penjelasan-penjelasan atau uraian-uraian yang dideskripsikan yang didapatkan melalui proses pengamatan, wawancara langsung dengan subjek penelitian maupun hasil analisis dari dokumen yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian ini, berupa data pemilih di desa Kalirejo. Sedangkan jenis data kuantitatif adalah data-data yang merupakan angka-angka yang diperoleh dari informan seperti tanggal lahir dan lain-lain.

Sumber data yang diperoleh oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari responden penelitian ini melalui pengamatan langsung, dan wawancara.
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui penelusuran sebagai literatur ilmiah data hasil penelitian yang relevan data yang diterbitkan oleh instansi terkait dan informasi dari sejumlah informan penelitian ini.

Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Kalirejo kecamatan Kabat kabupaten Banyuwangi. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Kalirejo yang berusia 17 tahun keatas atau yang sudah memenuhi syarat dalam menyuarkan hak pilihnya untuk pemilu. Masyarakat tersebut berjumlah kurang lebih 3800 pemilih.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode:

- 1) Studi Keputusan (*Library Study*), yaitu cara memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur laporan dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan judul penelitian.
- 2) Penelitian lapangan (*Field Reseach*), yaitu cara memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer melalui teknik:
 - a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terutama dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat politik pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi.
 - b. Wawancara yaitu mengadakan wawancara langsung dengan Informan. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis berdasarkan yang diteliti untuk memperoleh gambaran yang jelas.
 - c. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian, metode ini digunakan untuk menelusuri data historis. Informasi dokumentasi sangat masuk akal atau relevan untuk studi kasus dan membantu saat pelaksanaan penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data sekunder maupun hasil wawancara mendalam dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan data dan informasi yang diperoleh sebagaimana adanya, selanjutnya dilakukan analisis dengan interpretasi sesuai dengan kecenderungan data, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan observasi.
- b. Reduksi Data
Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

- c. Penyajian Data
Untuk mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian bagian tertentu dari data penelitian maka dilakukan penyajian data (*display data*). *Display data* adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

- d. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi
Data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan akhir untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Ketiga komponen berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar. Dan ternyata kesimpulannya tidak memadai, maka perlu diadakan pengujian ulang, yaitu dengan cara mencari beberapa data lagi di lapangan, dicoba untuk diinterpretasikan dengan fokus yang lebih terarah. Dengan begitu, analisis data tersebut merupakan proses interaksi antara ke tiga komponen analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktivitas penelitian selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan Umum. Dalam hal ini, warga negara

berperan penting dalam menseleksi pejabat-pejabat negara yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya (Suryadi, 2007).

Partisipasi politik dapat bermanfaat untuk: (1) memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah dalam bentuk pengiriman wakil atau pendukung, pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik; (2) menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki, atau mengubah kelemahan tersebut; (3) partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik (Syamsudin Haris, 2014).

Bahwa semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya, sehingga partisipasi politik, dalam hal ini keikutsertaan warga negara dalam Pemilu, menjadi penting. Pada sisi yang sama, pemahaman yang baik terhadap peran-peran strategis warga negara juga akan mendorong kualitas demokrasi (Liando, 2016).

Hakekatnya, Pilkada Serentak 2020 adalah pengalaman pertama kali bagi penyelenggara, Pilkada yang diselenggarakan dalam situasi khusus nonbencana. Pilkada Serentak yang idealnya dilaksanakan pada 9 September 2020 digeser menjadi 9 Desember 2020 setelah melalui banyak diskusi dan pertimbangan. Situasi ini tidak lain karena diakibatkan oleh merebaknya Pandemi Covid-19 yang melanda hampir diseluruh negara didunia.

Keputusan melaksanakan pemilihan di tengah pandemi tidak sepenuhnya mendapat respon positif

dari masyarakat. Setidaknya hal ini tergambar dari hasil survei online Litbang Kompas yang dilakukan pada 24-25 Maret 2020 atau sebelum terbitnya Perppu. Penelitian yang dilakukan di 27 Provinsi se-Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 1.315 responden menunjukkan bahwa pendapat publik tentang penundaan Pilkada sebesar 92 persen responden setuju tahapan Pilkada ditunda, mereka beralasan Pilkada ditengah pandemi rentang terhadap penyebaran covid-19 (jatim.bawaslu.go.id, 2020).

Dari survei tersebut juga diketahui bahwa mayoritas responden lebih setuju Pilkada ditunda sampai tahun 2021. 36,9 persen setuju ditunda pada September 2021. 32,3 setuju ditunda pada 17 Maret 2021 dan hanya 16,9 persen yang setuju ditunda pada 9 Desember 2020 sisanya menjawab tidak tahu. Berbeda dengan Litbang Kompas, survei yang dilakukan oleh Roda Tiga Konsultan (RTK) pada bulan Mei 2020 terhadap 1.200 responden, menunjukkan bahwa sebesar 52,2 persen menilai rencana melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 perlu ditunda kembali (antaranews.com, 2020).

Faktanya, Indonesia menjadi salah satu dari negara-negara yang berani mengambil resiko mengadakan pemilihan di bawah ancaman pandemi covid-19. Hal yang menjadi permasalahan krusial bagi negara yang melanjutkan pilkada serentak selain dari keselamatan masyarakat ialah mobilisasi pemilih. Berikut Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 di desa Kalirejo Kecamatan Kabat:

Tabel 1. Laporan Perhitungan Suara
PILBUP Desa Kalirejo-Kecamatan Kabat

NO	TPS	DPT	JUMLAH SUARA		
			PER TPS	SUARA SAH	SUARA TDK SAH
1	TPS 1	286	200	4	204
2	TPS 2	257	192	2	194
3	TPS 3	316	229	3	232
4	TPS 4	414	275	6	281
5	TPS 5	280	183	7	190
6	TPS 6	381	237	7	244
7	TPS 7	361	261	12	273
8	TPS 8	361	240	9	249
9	TPS 9	357	208	4	212
10	TPS 10	262	175	1	176
11	TPS 11	265	183	3	186
12	TPS 12	321	209	1	210
		3861	2592	59	2651

Data tabel 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di desa Kalirejo berjumlah 3861 pemilih yang terdiri dari 12 TPS. Sedangkan jumlah kehadiran pemilih sebanyak 2651 pemilih yang terdiri dari 2592 suara sah dan 59 suara tidak sah. Data diatas merupakan data Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020. Dari data diatas menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat desa Kalirejo cukup rendah. Dikarenakan DPT di desa Kalirejo berjumlah 3861 sedangkan jumlah masyarakat yang hadir yakni 2651, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Kalirejo banyak yang golput atau tidak menyuarakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Jumlah yang golput kurang lebih 1200 pemilih.

Tabel 1 diatas menunjukkan masih banyaknya masyarakat desa Kalirejo yang apatis terhadap pemerintah. Hal itu didasari oleh banyak faktor, salah satunya adanya *Covid-19*. Masyarakat akan cenderung takut untuk datang ke TPS dikarenakan takut tertular virus *Covid-19*. Padahal

tempat TPS sendiri sudah memenuhi protokol kesehatan yang sesuai. Selain itu juga, hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini yang menjadi krusial. Mengingat masyarakat berpikiran bahwa meskipun ganti pemimpin kehidupan mereka akan tetap saja.

Pada dasarnya suara rakyat sangat erat kaitannya dengan legitimasi hasil pemilihan, oleh karena itu “semakin sedikit yang memilih maka semakin rendah pula derajat legitimasi, sebaliknya, semakin banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya maka semakin tinggi pula legitimasi sebuah pemilihan.” Legitimasi hasil Pilkada merupakan modal awal yang paling berharga dalam proses dan pelaksanaan kekuasaan pemimpin didaerah.

Pemimpin yang dipilih secara mayoritas sudah tentu mendapat pengakuan politik dari masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diambilnya mengandung restu dari masyarakat. Secara umum partisipasi pemilih dan publik seringkali digunakan sebagai salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan Pemilu dan Pilkada. Seperti disinggung sebelumnya, bahwa makin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, makin legitimate pula sebuah Pilkada.

Pemerintahan yang efektif seringkali dihasilkan oleh Pilkada yang berlegitimasi. Secara kuantitatif, keberhasilan Pilkada dapat diukur dari angka pemilih yang menggunakan hak pilihnya ke TPS. Sedangkan secara kualitatif, dapat diukur dari pilihan rasional (*rational choice*) dan peran aktif pemilih dalam mengikuti dan mengawal tahapan. Pemilih yang menentukan pilihannya didasarkan oleh pertimbangan terhadap kemampuan parpol atau kandidat tertentu dengan melihat visi-misi, rekam jejak, dan program kerjanya dapat disebut sebagai pemilih rasional.

Dalam konteks regulatif, keberhasilan Pilkada ditandai oleh minimnya pelanggaran serta gugatan pada proses dan hasilnya. Dengan kata lain penyelenggaraannya dapat terlaksana dengan *luber-jurdil*. Indikator lainnya adalah Pilkada berlangsung dengan damai nir-kekerasan, ancaman dan intimidasi. Apabila dasar-dasar penyelenggaraan Pilkada yang *free and fair* dapat terbangun sepanjang tahapan, maka dengan sendirinya akan dapat memberikan tambahan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Sebaliknya, apabila penyelenggara tidak mampu membangun kesan Pilkada yang *free and fair*, masyarakat juga akan malas dan enggan menggunakan hak pilihnya.

Fenomena menurunnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak terakhir adalah *yellow code* bagi penyelenggara, mengingat pada Pemilu Serentak 2019, justru angka partisipasinya jauh mengungguli angka partisipasi Pilkada Serentak 2018. Beberapa persoalan klasik yang menjadi penyebab menurunnya angka partisipasi secara teoritik diurai oleh Hertanto (2018). Hertanto menyebut bahwa partisipasi politik masyarakat sangat ditentukan oleh beberapa hal antara lain, pertama, *political literacy*, masyarakat yang tidak memiliki modal pengetahuan politik cenderung tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaga politik sebagai sebuah sistem (Hertanto, 2017). Pada akhirnya, masyarakat yang tidak memiliki *stock of knowledge* politik yang memadai mendorong sikap acuh tidak acuh, tidak peduli dan masa bodoh terhadap setiap proses politik dan pemilu.

Kedua, muncul anggapan bahwa tidak ada dampak signifikan yang ditimbulkan dari proses politik dan Pilkada, khususnya bagi kehidupan

sosial-ekonomi pada wilayah domestik konstituen. Ketiga, seiring dengan maraknya kampanye negatif, kampanye hitam (*hoaks*), ujaran kebencian, praktik politik uang, suap, sogok, serta intoleransi yang menyertai Pemilu dan Pilkada, maka keduanya seringkali dianggap tidak mengajarkan pendidikan politik tentang kejujuran dan keadilan (*jurdil*).

Keempat, karena menurunnya kepercayaan konstituen kepada parpol menyebabkan melemahnya relasi pemilih dengan partai politik. Karena program dan platform yang tidak jelas mengakibatkan Parpol tidak punya akar konstituen. Selain itu, hanya menjelang pemilu ataupun pilkada saja Parpol baru mendekati dan berinteraksi dengan konstituen. Kelima, sistem pemilihan yang belum memberikan kemudahan bagi pemilih. Misal, banyaknya jenis surat suara, besarnya ukuran surat suara, pindah domisili terancam tidak bisa memilih, singkatnya waktu memilih, penggunaan KTP-el yang masih bermasalah, undangan memilih, dan lain sebagainya. Agar warga tidak malas datang ke tempat pemungutan suara dan mudah untuk menyalurkan hak pilihnya maka sudah seharusnya aturan memilih harus dibuat sesederhana mungkin. Terakhir, keenam, meningkatnya angka golput dapat dimaknai sebagai fenomena protes voting. Gejala itu sangat terkait dengan tiga faktor terakhir di atas. Apalagi perilaku memilih dalam Pemilu/Pilkada di Indonesia bukan merupakan kewajiban yang ada sanksinya, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara yang memenuhi syarat undang-undang (Hertanto, 2017).

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, wawancara dan pengolahan data maka dapat disimpulkan :

1. Respon masyarakat di Desa Kalirejo Kecamatan Kabat dalam mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi yakni cukup baik dalam partisipasi politik. Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang apatis terhadap pemilu ini. Salah satu faktornya yakni adanya covid-19.
2. Pada dasarnya masyarakat di Desa Kalirejo Kecamatan Kabat telah menjalankan nilai-nilai dari partisipasi politik. Dimana ikut aktif dalam kegiatan pemilu bupati dan wakil bupati banyuwangi. Ikt aktif dalam kegiatan memilih dan dipilih tapi dalam pelaksanaannya masih kurang tepat karena masih adanya kegiatan mobilisasi politik. Oleh karena itu partisipasi politik yang dilakukan masyarakat di Desa Kalirejo Kecamatan Kabat perlu diperbaiki agar pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai partisipasi politik yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Mokhammad Samsul. (2020). Meningkatkan angka partisipasi sebagai upaya menjamin legitimasi hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tengah pandemic covid-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 2 No. 18-38.
- Ni Ketut Arniti. 2020. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4 (2) 2020|329-3 46